

**ANALISIS PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN BARANG MILIK
NEGARA DI LINGKUNGAN DEWAN KETAHANAN NASIONAL**

Disusun Oleh:

NAMA : SOFYANTI ASTRI
NPM : 2143021085
JURUSAN : ADMINISTRASI PUBLIK
PROGRAM STUDI : ADMINISTRASI PEMBANGUNAN NEGARA
KONSENTRASI : MANAJEMEN KEUANGAN NEGARA

Tesis Diajukan Untuk Memenuhi Sebagai Syarat Guna Memperoleh Gelar
Magister Terapan Administrasi Publik (M.Tr.AP)



**POLITEKNIK
STIA LAN
J A K A R T A**

**LEMBAGA ADMINISTRASI NEGARA
POLITEKNIK STIA LAN JAKARTA
PROGRAM MAGISTER TERAPAN
TAHUN 2024**

**PROGRAM STUDI APN MAGISTER TERAPAN
POLITEKNIK STIA LAN JAKARTA**

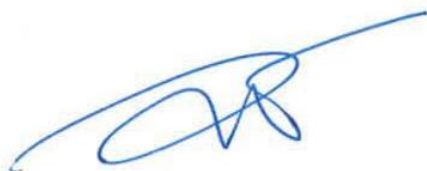
LEMBAR PERSETUJUAN TESIS

NAMA : SOFYANTI ASTRI
NPM : 2143021085
JURUSAN : ADMINISTRASI PUBLIK
PROGRAM STUDI : ADMINISTRASI PEMBANGUNAN NEGARA
KONSENTRASI : MANAJEMEN KEUANGAN NEGARA

JUDUL TESIS : Analisis Pengawasan dan Pengendalian Barang Milik Negara di Lingkungan Dewan Ketahanan Nasional
: *Analysis Of Monitoring And Control State Property In Dewan Ketahanan Nasional*

DITERIMA DAN DISETUJUI UNTUK DIPERTAHANKAN PEMBIMBING TESIS

PEBIMBING 1



Arifiani Widjayanti, PhD

PEBIMBING 2



Prof. Dr. R. Luki Kurnia,
SE. Ak. MA. CA. CACP

J A K A R T A

KATA PENGANTAR

Puji syukur atas segala karunia dan rahmat Allah SWT sehingga dengan keterbatasan yang dimiliki oleh penulis akhirnya tesis dengan judul “Analisis Pengawasan dan Pengendalian di Lingkungan Dewan Ketahanan Nasional” dapat diselesaikan.

Tesis ini disusun untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh gelar Magister Terapan Administrasi Publik (M.Tr.Ap) pada Program Pascasarjana (S2) Magister Administrasi Publik di Politeknik Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Lembaga Administrasi Negara Jakarta. Tesis ini dapat diselesaikan atas dukungan dari berbagai pihak sehingga dengan hati yang tulus peneliti mengucapkan terima kasih atas segala bimbingan dan bantuan yang telah diberikan dari awal sampai akhir penelitian, kepada:

1. Ibu Prof. Nurliah Nurdin, MA selaku Direktur Politeknik Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Lembaga Administrasi Negara Jakarta.
2. Ibu Arifiani Widjayanti, PhD dan Bapak Prof. R. Luki Karunia, SE., Ak. MA.CA.CACP selaku dosen pembimbing yang bersedia meluangkan waktu untuk memberikan bimbingan dan arahan selama proses penelitian.
3. Bapak Dr. Ridwan Rajab, M.Si, Bapak Edy Sutrisno, M.Si, dan Ibu Dr. Neneng Sri Rahayu, M.Si. selaku dosen pembahas yang bersedia memberikan masukan dan arahan selama proses penelitian.
4. Bapak dan Ibu Pejabat dan Pegawai di lingkungan Dewan Ketahanan Nasional RI yang bersedia memberikan izin penelitian dan meluangkan waktu untuk memberikan informasi sebagai upaya mendukung pengumpulan data wawancara, dokumentasi, dan/atau observasi penelitian.
5. Orang tua dan keluarga atas dukungan dan perhatian yang diberikan untuk kelancaran penelitian

6. Fauzi Nabawi Tri Hatmaja selaku pasangan atas dukungan dan perhatian yang diberikan untuk kelancaran dalam penelitian.
7. Teman-teman perkuliahan Manajemen Keuangan Negara tahun angkatan 2021 yang memberikan semangat dan dukungan.
8. Pihak-pihak lain yang telah mendukung penelitian.

Peneliti menyadari secara penuh bahwa penyusunan tesis ini masih terdapat kekurangan sehingga dengan segala kerendahan hati mengharapkan saran dan koreksi untuk memperoleh kondisi yang lebih baik. Namun peneliti memiliki harapan agar tesis ini juga dapat memberikan manfaat untuk semua pembacanya. Akhir kata, atas segala bentuk dukungan yang telah diberikan semoga dicatat sebagai ibadah dan pahala dari Allah SWT.



Jakarta, Oktober 2024

Sofyanti Astri

POLITEKNIK
STIA LAN
J A K A R T A

ABSTRAK

Analisis Pengawasan Dan Pengendalian Barang Milik Negara Di Lingkungan Dewan Ketahanan Nasional

Sofyanti Astri

sofyanti.2143021085@stialan.ac.id

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengawasan dan pengendalian Barang Milik Negara (BMN) di lingkungan Dewan Ketahanan Nasional serta menyusun strategi peningkatan pengawasan dan pengendalian di lingkungan Dewan Ketahanan Nasional. Metode Penelitian yang digunakan dalam penelitian studi kasus dengan pendekatan kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengawasan dan pengendalian Barang milik negara melalui pemantauan dan penertiban pada proses pengelolaan barang milik negara penggunaan, pemanfaatan, pemindahtanganan, penatausahaan, pengamanan dan pemeliharaan. pelaksanaan pemantauan dan penertiban yang dilakukan dalam pengawasan dan pengendalian barang milik negara masih belum optimal dan masih ditemukan berbagai macam kelemahan seperti pegawai tidak memiliki kompetensi di bidang pengelolaan barang milik negara, belum memiliki kebijakan turunan berbentuk peraturan internal, infastruktur yang belum memadai. Pada penentuan strategi untuk peningkatan pengawasan dan pengendalian Barang Milik Negara adalah pembuatan peraturan turunan dari PMK pengelolaan Aset dan pembuatan SOP terhadap seluruh tahapan pelaksanaan pengelolaan aset, memberikan pelaksanaan monitoring dan evaluasi secara berkala, pemeliharaan aset dan pengecekan kondisi aset, pemberian prosedur kerja untuk aset tidak berwujud, melakukan evaluasi atas hasil audit yang telah dilakukan oleh APIP dan juga melakukan update data aset sesuai dengan ketentuan yang berlaku, dan perlu dilakukan tindak lanjut dari pimpinan atas pelaksanaan pengelolaan Barang Milik Negara di lingkungan Dewan ketahanan Nasional dapat lebih baik lagi

Kata Kunci: Pengawasan, Pengendalian, Analisis, Strategi, Dewan Ketahanan Nasional

POLITEKNIK
STIA LAN
J A K A R T A

ABSTRACT

Analysis of Supervision and Control of State Property in the Council Environment National Resilience

Sofyanti Astri

sofyanti.2143021085@stialan.ac.id

This study aims to analyze the supervision and control of State Property (BMN) in Dewan Ketahanan Nasional environment and to develop strategies to improve supervision and control in Dewan Ketahanan Nasional. The research method used in the case study research with a qualitative approach. The results of the study indicate that supervision and control of State Property through monitoring and regulation in the process of managing state property use, utilization, transfer, administration, security and maintenance. The implementation of monitoring and regulation carried out in the supervision and control of state property is still not optimal and various weaknesses are still found such as resources do not have competence in the field of managing state property, do not have derivative policies in the form of internal regulations, inadequate infrastructure. In determining the strategy for improving supervision and control of State Property, the creation of derivative regulations from the PMK on Asset Management and the creation of SOPs for all stages of asset management implementation, providing periodic monitoring and evaluation, asset maintenance and checking of asset conditions, providing work procedures for intangible assets, conducting evaluations of audit results that have been carried out by APIP and also updating asset data in accordance with applicable provisions, and it is necessary to carry out follow-up from the leadership on the implementation of State Property management in the National Resilience Council environment to be even better.

Keywords: Supervision, Control, Analysis, Strategy, National Resilience Council

**POLITEKNIK
STIA LAN
J A K A R T A**

DAFTAR ISI

LEMBAR PENGESAHAN	ii
KATA PENGANTAR	iv
ABSTRAK	vi
<i>ABSTRACT</i>	vii
DAFTAR ISI.....	viii
DAFTAR TABEL.....	x
DAFTAR GAMBAR	xi
DAFTAR LAMPIRAN.....	xii
BAB I PERMASALAHAN PENELITIAN.....	1
A. Latar Belakang	1
B. Identifikasi Masalah.....	7
C. Rumusan Masalah.....	8
D. Tujuan Penelitian	8
E. Manfaat Penelitian	9
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	10
A. Penelitian Terdahulu	10
B. Tinjauan Kebijakan	17
C. Tinjauan teori	30
BAB III METODE PENELITIAN.....	62
A. Metode Penelitian.....	62
B. Lokus Penelitian.....	63
C. Teknik Pengumpulan Data.....	63

D. Teknik Pengolahan dan Analisis Data	64
E. Instrumen Penelitian.....	66
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	67
A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian	67
B. Pembahasan Hasil Penelitian	70
BAB V SIMPULAN DAN SARAN	103
A. Kesimpulan	103
B. Saran.....	106
DAFTAR PUSTAKA	107



**POLITEKNIK
STIALAN
JAKARTA**

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Nilai Aset Tak Berwujud yang tidak diketahui keberadaanya.....	5
Tabel 1.2 Masa Manfaat dan Tarif Penyusutan Harta Berwujud.....	6
Tabel 1.3 Aset Rusak Berat.....	7
Tabel 2.1 Penelitian terdahulu.....	10
Tabel 2.2 Penyertaan dokumen penetapan Status Penggunaan Barang Milik Negara (BMN) Dokumen dalam penetapan status penggunaan Barang Milik Negara.....	21
Tabel 3.1 Key Informan.....	64
Tabel 4.1 Kesesuaian Penggunaan Barang Milik Negara.....	71
Tabel 4.2 Laporan Penggunaan Barang Milik Negara sesuai dengan Penetapan Status Penggunaan.....	72
Tabel 4.3 Laporan Penetapan Status Penggunaan Barang Milik Negara di Lingkungan Dewan Ketahanan Nasional.....	73
Tabel 4.4 Daftar Barang Milik negara (BMN) yang dilakukan pengajuan pemindahtanganan (lelang).....	80
Tabel 4.5 Aset Tidak Berwujud yang sudah tidak digunakan.....	91

POLITEKNIK
STIA LAN
J A K A R T A

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Manajemen Aset.....	39
Gambar 2.2 Kerangka Berpikir.....	61
Gambar 4.1 Struktur Organisasi.....	69
Gambar 4.1 Rapat Koordinasi dengan Direktorat Jenderal Kekayaan Negara.....	74
Gambar 4.2 Gedung Pinjam Pakai 1 yang berlokasi di Medan Merdeka Barat...	76
Gambar 4.3 Gedung Pinjam Pakai 2 yang berlokasi di Ir. H. Juanda.....	76
Gambar 4.4 Surat Perjanjian Penggunaan Sementara Barang Milik Negara (BMN) antara Dewan Ketahanan Nasional dengan Kementerian Sekretariat Negara RI.....	77
Gambar 4.5 Dokumentasi Rapat Koordinasi dengan Kementerian Sekretarian Negara.....	77
Gambar 4.6 Dokumentasi Aset yang akan dilakukan lelang.....	79
Gambar 4.6Daftar Barang Milik negara (BMN) yang dilakukan pengajuan pemindahtanganan (lelang).....	82
Gambar 4.7 Label Kodefikasi BMN.....	89
Gambar 4.8 Daftar Barang Ruangan.....	90
Gambar 4.9 Dokumentasi Gudang Aset Aktif	94
Gambar 4.10 Dokumentasi Gudang Aset Rusak Berat	94
Gambar 4.11 Dokumentasi CCTV	95
Gambar 4.18 Dokumentasi Pengamanan Dalam.....	95

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 Surat Keterangan Telah Melaksanakan Penelitian.....	110
Lampiran 2 Proposal Permohonan Ijin Penelitian Mahasiswa.....	111
Lampiran 3 Pedoman Wawancara.....	112
Lampiran 4 Daftar Riwayat Hidup.....	114



**POLITEKNIK
STIALAN
JAKARTA**

BAB I

PERMASALAHAN PENELITIAN

A. Latar Belakang

Seiring dengan perkembangan waktu, pengelolaan Barang Milik Negara (BMN) semakin baik. Di masa lalu, Indonesia tidak pernah melakukan pencatatan dan pengelolaan aset dengan baik. Pemerintah melakukan langkah proses perbaikan pengelolaan kekayaan negara dengan membuat Undang-Undang No 17 pada Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, yang mengatur semua hak dan kewajiban negara yang dapat dinilai dengan uang dan segala bentuk baik berupa uang maupun berupa barang yang dapat dijadikan milik Negara. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan yang merupakan pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan negara termasuk investasi dan kekayaan yang dipisahkan yang telah ditetapkan dalam APBN/APBD.

Unsur Penting bagi penyelenggaraan pemerintah adalah dengan melakukan administrasi publik menurut Rosenbloom & Deborah (1989) administrasi publik adalah bentuk pemanfaatan yang berdasar dari teori, proses manajemen, politik dan hukum untuk mengoptimalkan kegiatan pemerintah dan peningkatan pelayanan masyarakat, Pengelolaan Barang Milik Negara (BMN) merupakan suatu proses dalam mengelola kekayaan yang di peroleh dari beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) untuk penunjang proses manajemen pemerintah. Pengelolaan Barang Milik Negara/ Daerah sesuai dengan Peraturan pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 meliputi perencanaan kebutuhan dan penganggaran, pengadaan, penggunaan, pemanfaatan, pengamanan dan pemeliharaan, penialaian, penghapusan, pemindahtanganan, penatausahaan, pembinaan, pengawasan dan pengendalian.

Barang Milik Negara (BMN) merupakan aset tetap dan aset tidak berwujud. Aset adalah barang/benda yang memiliki nilai ekonomis, nilai komersial yang digunakan oleh badan usaha, lembaga atau perorangan, Menurut A. Gima Sugiama

(2013) aset dibagi 2 berdasarkan bentuknya yaitu aset berwujud merupakan kekayaan yang dilihat secara fisik dan panca indera, dan aset tidak berwujud merupakan kekayaan yang tidak berwujud secara fisik dan tidak dapat disentuh, dilihat atau diukur secara fisik tetapi dapat diidentifikasi sebagai kekayaan secara terpisah dan kekayaan dapat memberikan manfaat serta memiliki nilai tertentu secara ekonomi.

Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah berdasarkan Peraturan pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 semua barang yang dibeli atau diperoleh berupa tanah gedung jalan irigasi dan jaringan, dan aset tetap lainnya yaitu konstruksi dalam pengerjaan, aset tak berwujud, aset kemitraan dengan pihak ketiga serta aset lainnya melalui APBN berasal dari perolehannya perlu dilakukan pengelolaan.

Penyelenggaran pengelolaan Barang Milik Negara (BMN) perlu menerapkan manajemen aset pada seluruh siklus hidup aset, manajemen aset publik menurut Summerell (2005) adalah komponen yang mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi organisasi secara efektif dan efisien. Manajemen aset merupakan suatu proses pengambilan keputusan dan implementasi yang berkaitan dengan perolehan, penggunaan, penghapusan aset.

Menurut Yusuf (2011) siklus pengelolaan aset yang pertama adalah melakukan perencanaan kebutuhan dan penganggaran hal ini dibutuhkan untuk merumuskan BMN yang dibutuhkan di masa yang akan datang dengan dasar keadaan yang sedang berjalan. Selanjutnya pengadaan, proses ini dilakukan untuk kebutuhan yang diperlukan pada barang/jasa pemerintahan, selanjutnya melakukan penerimaan, penyimpanan dan penyaluran proses ini dilakukan oleh Pejabat Pengelola Barang dan Jasa (PPBJ), para pimpinan pelaksana teknis, dan bendahara, selanjutnya penggunaan, merupakan kegiatan yang dilakukan pengguna atau kuasa pengguna dalam menjalankan manfaat dari Barang Milik Negara (BMN) dengan mengelola dan menatausahakan Barang Milik Negara (BMN) sesuai tugas dan fungsinya, selanjutnya penatausahaan Barang

Barang Milik Negara (BMN) yaitu dengan melakukan pembukuan, menginventarisir, dan membuat laporan Barang Milik Negara (BMN) sesuai dengan ketentuan yang berlaku, selanjutnya pemanfaatan kegiatan penggunaan manfaat dari Barang Milik Negara (BMN) yang telah digunakan, selanjutnya pengamanan dan pemeliharaan kegiatan ini merupakan tindak pengendalian dalam pengurusan Barang Milik Negara (BMN) dan pemeliharaaan agar Barang Milik Negara (BMN) yang digunakan dalam keadaan baik dan siap digunakan, selanjutnya penilaian, kegiatan ini dilakukan untuk memberikan penelian yang selektif yang didasari oleh relevannya sebuah data/fakta untuk memperoleh nilai Barang Milik Negara (BMN) dengan metode tertentu, selanjutnya adalah penghapusan hal ini dilakukan untuk melakukan penghapusan Barang Milik Negara (BMN) dari daftar barang kepada kuasa pengguna dari tanggung jawab administrasi dan fisik atau dasar barang yang berada dalam pengawasan, selanjutnya pemindahtanganan, hal ini dilakukan untuk melakukan pengalihan kepemilikan Barang Milik Negara (BMN) untuk langkah selanjutnya yaitu penghapusan dengan cara dijual, ditukar, dihibahkan atau diberikan sebagai modal, selanjutnya pembinaan, pengawasan dan pengendalian, siklus ini dilakukan agar tidak terjadi manipulasi penggunaan aset, selanjutnya pembiaayaan dilakukan dalam rangka pembelian atau pemeliharaan Barang Milik Negara (BMN), yang terakhir adalan tuntutan ganti rugi siklus ini dilakukan pada setiap aset yang hilang baik dilakukan bendahara, pejabat, atau pegawai berdasarkan kelalaian perlu dilakukan tuntutan ganti rugi Barang Milik Negara (BMN). dalam

Berdasarkan *State Of Victorian (2016)* dalam Yuniati (2019) instansi pemerintah dalam melaksanakan pengelolaan aset yang baik harus dipedomani oleh beberapa prinsip manajemen yang pertama, kebutuhan layanan, prinsip ini harus dilakukan dengan transprasi sebagai startegi manajemen aset untuk pelaksanaan manajemen aset dan engambilan keputusan yang akan meningkatkan perolehan aset yang sesuai dengan petensi layananannya. Kedua, integrasi manajemen aset dengan melakukan perencanaan kebutuhan aset dan perencanaan anggaran. Ketiga, Pengambilan keputusan yang sesuai dengan pendekatan siklus hidup aset,

keputusan pada manajemen aset perlu terinformasikan dan di evaluasi berdasarkan alternatif penyedia layanan, biaya selama siklus hidup aset, dan pengukuran kinerja. Keempat, dalam mengelola aset secara efektif perlu adanya akuntabilitas dan tanggung jawab untuk mengontrol aset yang digunakan, untuk dapat bisa dinilai melihat kondisi aset, penggunaan dan kinerja. Kelima, melakukan keberlanjutan aset, melakukan hal tersebut agar dapat menjamin keadilan antar generasi, keberlanjutan jangka panjang pada instansi harus menjadikan pedoman dalam pengambilan keputusan dari manajemen aset, Pengelolaan aset perlu dikelola untuk memberikan manfaat layanan yang dapat mendukung ketersediaan bagi generasi mendatang.

Kementerian keuangan membuat Peraturan Menteri Keuangan Nomor 207/PMK.06/2021 tentang pengawasan dan pengendalian Barang Milik Negara (BMN), pelaksanaan dan pengelolaan Barang Milik Negara (BMN), dan/atau pada pejabat/pegawai yang melakukan pengelolaan dan pengurusan Barang Milik Negara (BMN) yang dilakukan oleh pengguna barang dan kuasa pengguna barang dengan melakukan pemantauan dan penertiban. Pengawasan dan pengendalian dilakukan dengan melakukan pemantauan dan penertiban atas pelaksanaan penggunaan, pemanfaatan, pemindahtanganan penatausahaan dan pengamanan Barang Milik Negara (BMN), memberikan penjelasan atas permintaan pengelola barang terhadap hasil pemantauan dan investigasi.

Laporan Barang Milik Negara (BMN) mencerminkan bagaimana pengelolaan Barang Milik Negara (BMN) yang dilakukan oleh instansi pemerintah, idealnya jika pada pengawasan dan pengendalian BMN dilakukan dengan optimal maka pengelolaan Barang Milik Negara akan menjadi baik dan maksimal. (Badan Pengawasan dan Pembangunan, 2015).

Dewan Ketahanan Nasional adalah lembaga non-kementerian yang bertanggungjawab kepada Presiden sebagai Ketua Dewan Ketahanan Nasional. Penyelenggaraan kegiatan Dewan Ketahanan Nasional dilakukan oleh Sekretariat Jenderal Dewan Ketahanan Nasional yang dipimpin oleh Sekretaris Jenderal

Dewan Ketahanan Nasional yang memiliki tugas merekomendasikan rancangan kebijakan dan strategi nasional dalam rangka pembinaan ketahanan nasional untuk menjamin pencapaian tujuan dan kepentingan nasional. Sekretariat Jenderal Dewan Ketahanan Nasional selaku Pengguna anggaran yang berkewajiban dalam melakukan pengelolaan keuangan negara sesuai amanah Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003.

Berdasarkan hasil audit keuangan atas asset lain-lain yang dilakukan oleh pengawas internal terdapat beberapa temuan yang berkaitan dengan asset. Pertama adalah adanya proses penghapusan atas asset tetap dan ATB Lisensi yang sudah tidak digunakan dalam operasional pemerintah yang masih belum terselesaikan yang nilai pengajuannya sudah tidak tercatat/ telah dihapus pada neraca.

Tabel 1.1
Nilai Aset Tak Berwujud yang tidak diketahui keberadaannya

Nama Barang	Kondisi Berdasarkan Sakti	Kondisi Menurut Pengguna Barang	Tahun Perolehan	Jumlah Software	Total Nilai Perolehan	Masa Pakai	Keberadaan
Software Komputer	Baik	Tidak Dapat di Akses	2014	1	Rp 40.000.000,00	4 Tahun	Server Internal
Software Komputer	Baik	Tidak Dapat di Akses	2015	6	Rp 11.801.459.248,00	4 Tahun	Server Internal
Software Komputer	Baik	Tidak Dapat di Akses	2016	13	Rp 28.869.457.725,00	4 Tahun	Server Internal
Software Komputer	Baik	Tidak Dapat di Akses	2017	17	Rp 29.387.339.159,00	4 Tahun	Server Internal
Jumlah					Rp 70.098.256.132,00		

Sumber: Diolah oleh Peneliti

Berdasarkan data diatas total terdapat 37 software senilai Rp. 70.098.256.132,- yang berupa aset tidak berwujud yang tidak diketahui keberadaannya, sesuai dengan informasi pengguna barang di unit bagian Sistem

Informasi Biro PSP, software tersebut tidak dapat di akses tetapi masih tercatat aktif di aplikasi SAKTI.

Kedua masih banyaknya aset tetap yang sudah melebihi batas usia pakai namun tidak ada pengajuan proses lelang, ketiga adanya barang hasil investigasi/identifikasi BMN dengan kondisi rusak berat, keempat belum adanya pengadministrasian BMN khusus aset tak berwujud.

Sesuai dengan PMK No 72 Tahun 2023 tentang penyusutan Harta Berwujud dan/atau Amortisasi Harta Tak Berwujud untuk perhitungan penyusutan masa manfaat dan tarif penyusutan harta berwujud penetapannya sebagai berikut:

Tabel 1.2
Masa Manfaat dan Tarif Penyusutan Harta Berwujud

Kelompok Harta Berwujud	Masa Manfaat	Tarif Penyusutan sebagaimana dimaksud pada	
		ayat (1)	Ayat (2)
I. Bukan Bangunan			
Kelompok 1	4 Tahun	25%	50%
Kelompok 2	8 Tahun	13%	25%
Kelompok 3	16 Tahun	6,25%	12,5%
Kelompok 4	20 Tahun	5%	10%
II. Bangunan			
Permanen	20 Tahun	5%	
Tidak Permanen	10 Tahun	10%	

Sumber: PMK No 72 Tahun 2023

Aset Tetap yang berada di lingkungan Dewan Ketahanan Nasional yang dihentikan penggunaannya memiliki kategori 1 sesuai dengan PMK No 72 Tahun 2023 memiliki kelompok 1 dengan jenis usaha semua jenis harta yang berupa mebel dan peralatan dari kayu atau rotan yang bukan dari bagian bangunan mesin kantor termasuk peranti elektronik lainnya, kendaraan, dan alat komunikasi yang telah melebihi batas umur ekonomis sesuai dengan penyusutannya sebagai berikut:

Tabel 1.3
Aset Rusak Berat

No	Kelompok	Jumlah	Tahun Perolehan	Masa Manfaat	Lama Habisnya Masa Manfaat	Keterangan
1	1	1	1996	4 Tahun	23 Tahun	Rusak Berat
2	1	1	1997	4 Tahun	22 Tahun	Rusak Berat
3	1	4	1998	4 Tahun	20 Tahun	Rusak Berat
4	1	2	1999	4 Tahun	20 Tahun	Rusak Berat
5	1	3	2000	4 Tahun	19 Tahun	Rusak Berat
6	1	1	2003	4 Tahun	16 Tahun	Rusak Berat
7	1	1	2005	4 Tahun	14 Tahun	Rusak Berat
8	1	6	2006	4 Tahun	13 Tahun	Rusak Berat
9	1	5	2007	4 Tahun	12 Tahun	Rusak Berat
10	1	3	2008	4 Tahun	11 Tahun	Rusak Berat
11	1	5	2009	4 Tahun	10 Tahun	Rusak Berat
12	1	3	2010	4 Tahun	9 Tahun	Rusak Berat
13	1	1	2011	4 Tahun	8 Tahun	Rusak Berat
14	1	4	2012	4 Tahun	7 Tahun	Rusak Berat
15	1	1	2014	4 Tahun	5 Tahun	Rusak Berat
16	1	9	2015	4 Tahun	4 Tahun	Rusak Berat
17	1	28	2016	4 Tahun	3 Tahun	Rusak Berat
18	1	5	2017	4 Tahun	2 Tahun	Rusak Berat
19	1	3	2018	4 Tahun	1 Tahun	Rusak Berat

Sumber: Data Diolah Peneliti

Data diatas mencerminkan kondisi aset berdasarkan masa manfaatnya sudah melebihi batas waktu yang seharusnya hanya 4 tahun tetapi kenyataan dilapangan masih digunakan perlu dilakukan Pengawasan dan pengendalian dalam pengelolaan Barang Milik Negara (BMN).

Berdasarkan latar belakang diatas yang telah diuraikan, maka penulis tertarik untuk membahas dan menganalisanya dengan melakukan penelitian yang berjudul “**Analisis Pengawasan dan Pengendalian Barang Milik Negara di Lingkungan Dewan Ketahanan Nasional.**”

B. Identifikasi Masalah

Dari uraian latar belakang masalah yang telah diungkapkan, maka peneliti mengidentifikasi masalah-masalah pengawasan dan pengendalian Barang Milik

Negara (BMN) yang terjadi di lingkungan Dewan Ketahanan Nasional sehingga penting untuk dilakukan penelitian antara lain:

1. Terdapat Aset Tidak Berwujud (ATB) yang tidak diketahui keberadaannya;
2. Terdapat Aset yang umur ekonomisnya melebihi batas usia pakai akan tetapi hanya disimpan digudang dan tidak dilakukan pelelangan, pemusnahan, dan pemindahtanganan;
3. Terdapat Aset Tidak Berwujud (ATB) yang tidak diketahui keberadaannya dan belum diadministrasikan sama sekali;
4. Terdapat kurang cermatnya penataan aset tetap yang sudah melebihi batas usia pakai, dan kondisi rusak;
5. Terdapat Pengadministrasian Barang Milik Negara (BMN) khusus Aset Tak Berwujud (ATB) yang belum memadai.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, dapat dirumuskan suatu permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana Pengawasan dan Pengendalian Barang Milik Negara di Lingkungan Dewan Ketahanan Nasional?
2. Bagaimana Strategi peningkatan Pengawasan dan Pengendalian Barang Milik Negara di Lingkungan Dewan Ketahanan Nasional?

D. Tujuan Penelitian

Adapun yang menjadi tujuan penelitian yaitu:

1. Untuk menganalisis pengawasan dan pengendalian Barang Milik Negara di Lingkungan Dewan Ketahanan Nasional.
2. Untuk menyusun strategi peningkatan pengawasan dan pengendalian Barang Milik Negara di Lingkungan Dewan Ketahanan Nasional.

E. Manfaat Penelitian

Hasil Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi berbagai pihak, diantaranya sebagai berikut:

1. Bagi Instansi

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan saran dan rekomendasi untuk strategi peningkatan pengendalian dan pengawasan Barang Milik Negara (BMN) di Lingkungan Dewan Ketahanan Nasional.

2. Bagi Akademisi

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan referensi bagi peneliti selanjutnya yang berkaitan dengan strategi peningkatan pengendalian dan pengawasan Barang Milik Negara (BMN) di Lingkungan Dewan Ketahanan Nasional.



BAB V

SIMPULAN DAN SARAN

Bagian ini berisikan kesimpulan yang berkaitan dengan pertanyaan yang diajukan dalam rumusan masalah penelitian dan rekomendasi dalam pelaksanaan pengawasan dan pengendalian di lingkungan Dewan Ketahanan Nasional

A. Kesimpulan

Hasil penelitian dari wawancara dan telaah dokumentasi pada Analisis dan strategi pada pengawasan dan pengendalian Barang Milik Negara (BMN) di lingkungan Dewan Ketahanan Nasional, maka kesimpulan pada setiap pertanyaan penelitian sebagai berikut:

1. Masih belum optimalnya pelaksanaan pengawasan dan pengendalian di lingkungan Dewan Ketahanan Nasional. Pengawasan dan pengendalian Barang Milik Negara sesuai Peraturan Menteri Keuangan Nomor 207/PMK.06/2021 tentang pengawasan dan pengendalian Barang Milik negara dilakukan pemantauan dan penertiban atas Barang Milik Negara yang dimiliki oleh Kementerian/Lembaga, Adapun pemantauan dan penertiban yang dilakukan pada pelaksanaan pengelolaan Barang Milik Negara sebagai berikut:
 - a. Penggunaan Barang Milik Negara, pada tahapan ini dapat disimpulkan bahwa pengawasan dan pengendalian sudah dilakukan dengan memastikan pengguna barang adalah yang berhak dalam penggunaan Barang Milik Negara dan sesuai kebutuhan guna menunjang kegiatan pelayanan dan pelaksanaan tugas pemerintahan, tetapi masih terdapat penggunaan Barang Milik Negara yang belum dilakukan penetapan status penggunaan. Penertiban yang dilakukan

dengan mendorong percepatan pelaksanaan penetapan penggunaan status

- b. Pemanfaatan Barang Milik negara, dilakukan dengan melakukan sewa gedung perkantoran. Pada tahapan ini dapat disimpulkan bahwa pengawasan dan pengendalian sudah dilakukan dengan memastikan dokumen perjanjian sesuai dengan aturan, terdapat kendala dalam pelaksanaan pemanfaatan yang dilakukan adalah keterbatasan ruang gerak dalam merubah bentuk gedung atau penambahan ruangan dikarenakan kebutuhan dan peran Dewan Ketahanan Nasional terhadap Masyarakat, penertiban yang dilakukan adalah dengan menjaga dan melakukan komunikasi secara berkala dalam menyampaikan kebutuhan dari Dewan Ketahanan Nasional peran pimpinan dibutuhkan dalam hal ini.
- c. Pemindahtanganan Barang Milik Negara, tahapan ini dilakukan sebagai tahapan proses penghapusan Barang Milik Negara kepada aset rusak berat, pemantauan pengawasan dan pengendalian yang dilakukan dengan memastikan bahwa status aset yang akan dilakukan pemindahtanganan merupakan betul aset rusak berat dan telah dilakukan proses pemindahtanganan (lelang) yang dilakukan oleh Wantannas.
- d. Penatausahaan, kegiatan ini merupakan proses pembukuan, inventarisasi, dan pelaporan Barang Milik Negara/Daerah, dalam pemantauan pengawasan dan pengendalian pada penatausahaan sudah dilakukan sesuai aturan pada pembukuan, tetapi pada inventarisasi dan pelaporan yang masih belum optimal dikarenakan masih terkendala tindak lanjut proses penghapusan atas Aset tetap dan Aset Tidak berwujud Lisensi dikarenakan masih adanya kelengkapan dokumen yang belum terpenuhi, pada pelaporan penyajian dan pelaporan CALK Neraca belum handal, belum berisikan informasi penjelasan penjelasan atas aset-aset tersebut,

tidak penertiban yang dilakukan perlunya peran pimpinan dalam mengawal proses penghapusan dan mengawal proses kelengkapan administrasi, dan juga memberikan diklat kepada para pegawai yang melaksanakan agar pembuatan laporan bisa lebih handal.

e. Pengamanan Barang Milik Negara, kegiatan ini merupakan kegiatan pengamanan administrasi, fisik dan hukum, pemantauan pengawasan dan pengendalian terhadap pengamanan sudah dilakukan dengan adanya petugas yang melakukan pengamanan pada aset yang berada pada kawasan perkantoran, pengamanan pada administrasi dengan melakukan pembuatan BA peminjaman dan BA serah Terima, dan juga memberikan payung hukum kepada objek aset yang membutuhkan, tetapi pada pelaksanaan pengamanannya belum optimal dikarenakan terdapatnya kehilangan pada kendaraan dinas kantor di area perkantoran, penertiban yang dilakukan adalah dengan memperbaiki fasilitas penunjang pengamanan berupa CCTV dan melakukan Tuntutan Ganti Rugi kepada pengguna barang yang telah lalai dalam penggunaan barang Negara.

f. Pemeliharaan Barang Milik Negara, pemantauan pengawasan dan pengendalian pada proses ini adalah dengan melihat bahwa aset yang dimiliki Dewan Ketahanan dilakukan secara rutin dan berkala.

2. Strategi Peningkatan Pelaksanaan Pengawasan dan Pengendalian Barang Milik Negara di lingkungan Dewan Ketahanan Nasional.

a. Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan. Strategi peningkatan pada pengawasan dan pengendalian Barang Milik Negara sebagai berikut: Penerapan standar yaitu dengan pembuatan peraturan turunan dari PMK pengelolaan Aset dan pembuatan SOP terhadap seluruh tahapan pelaksanaan pengelolaan aset.

b. Penentuan pengukuran pelaksanaan kegiatan dilakukan dengan memberikan pelaksanaan monitoring dan evaluasi secara berkala, pemeliharaan aset dan pengecekan kondisi aset.

- c. Pengukuran pelaksanaan kegiatan dilakukan dengan menghitung masa manfaat dari seluruh aset dan pemberian prosedur kerja untuk aset tidak berwujud.
- d. Membandingkan pelaksanaan dengan standar dan analisis penyimpangan pada proses ini pengawasan yang diperlukan adalah dengan segera melakukan evaluasi atas hasil audit yang telah dilakukan oleh APIP dan juga melakukan update data aset sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- e. Pengambilan Tindakan koreksi bila diperlukan pada tahapan pengawasan ini perlu dilakukan tindak lanjut dari pimpinan dari hasil audit agar pelaksanaan pengelolaan Barang Milik Negara di lingkungan Dewan Ketahanan Nasional dapat lebih baik lagi.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian hasil penelitian yang dikemukakan peneliti belum sempurna dan diharapkan dapat memberikan manfaat bagi pengelola Barang Milik Negara di Lingkungan Dewan Ketahanan Nasional, adapuns aran yang dapat diberikan berdasarkan hasil analisis penelitian sebagai berikut:

1. Penyusunan Peraturan Turunan dari Peraturabn Pemerintah dan Peraturan Menteri Keuangan yang sudah dijadikan pedoman agar dapat lebih optimal dan sesuai dengan kondisi dalam melakukan pengawasan dan pengendalian Barang Milik Negara.
2. Peningkatan kompetensi pegawai dengan melakukan diklat diharapkan pegawai yang melakukan pengawasan dan pengendalian Barang Milik Negara lebih mengetahui secara aturan dan teknis pelaksanaan.
3. Melakukan Benchmarking terhadap instansi yang sudah melakukan pelaksanaan pengawasan dan pengendalian dengan nilai baik, agar dapat melihat, mencontoh, dan mempraktikan pengawasan dan pengendalian Barang Milik Negara.
4. Peran pimpinan dalam melaksanakan pengawasan dan pengendalian Barang Milik Negara agar menjadi lebih baik.

DAFTAR PUSTAKA

- A, Gima Sugiana. (2013). *Manajemen Aset Pariwisata Bandung*. Bandung: Guardaya Intimarta.
- Abdul, H. (2007). *Akuntansi Keuangan Menengah (Intermediate Accounting) Ringkasang Teori, soal dan latihan mandiri, Buku 2*. Yogyakarta: BPFE Yogyakarta.
- Abdullah, F. A., & Wasilah. (2009). *Akuntansi Biaya*. Jakarta: Salemba Empat.
- Andrews, Kenneth R. (2005) *Konsep Strategi Perusahaan*. Jakarta. Erlangga
- Anggara, S. (2016). *Ilmu Administrasi Negara: Kajian Konsep, Teori, dan Fakta dalam Upaya Menciptakan Good Governance*. Bandung: Pustaka Setia.
- Anthony&Govindarajan Penerjemahan F.X Kurniawan Tjakarawala&Krista. (2005) *Management Control System*. Edisi 11. Penerbit Salemba Empat Buku 2. Jakarta
- Aprilia, I., Syakuat, Y., & Falatehan, A. F. (2018). Optimasi Manajemen Aset Tetap Daerah Dalam Mewujudkan Good Governance di Pemerintahan Provinsi DKI Jakarta. *Jurnal Manajemen Pembangunan Daerah*.
- Azhar, S. (2008). *Sistem Informasi Akuntansi-Struktur-Pengendalian-Resiko-Pengembangan. Cetakan Pertama*. Bandung: Lingga Jaya .
- Campbell, J.D., Jardine. A.K.& McGlynn, J. (Eds). (2016) *Asset Management ExcellenceL Optimizing Equipment Life-cycle decisions*. CRC Press.New York
- Dwi Martani&dkk. (2012). *Akuntansi Keuangan Menengah Berbasis PSAK*. Jakarta: Salema Empat.
- Dewi Risnawati (2017). Pengelolaan Aset Desa Dalam Upaya Meningkatkan Kesejahteraan di Desa Krayan Bahagia Kecamatan Long Ikis Kabupaten Paser. *eJournal Ilmu Pemerintahan* , 199-212.
- Doli, D. S. (2004). *Management Asset Strategi Penataan Konsep Pembangunan Berkelanjutan Secara Nasional Dalam Rangka Konteks Kepala Daerah Sebagai CEO'S Pada Era Globalisasi dan Otonomi Daerah*. Jakart: PT. Gramedia Pustaka Utama.
- Effendi, Usman (2014). *Asas Manajemen*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Gorge, R. T. (2005). *Principles Of Management*. New York: Alexander hamilton Insitute.
- Griffin. (2005). *Customer Loyalty*, Jakarta: Erlangga
- Julina Aisyafarda (2008). *Kepemimpinan Budaya Organisasi dan Manajemen Strategik*. Yogyakarta: Garaha Ilmu
- Handoko, T. H. (2016). *Manajemen*. Yogyakarta : BPFE.
- Hariyono, A. (2007). *Prinsip & Teknik Manajemen Kekayaan Negara*. Jakarta: Departemen.
- Harnanto. (n.d.). op.cit. 259-260.

- Hartanto, N. (2018). Implementasi PP No. 27 Tahun 2014 tentang pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah Dalam Upaya Meningkatkan Efektivitas Pengelolaan Barang dan Jasa. *Journal Of Managemen Review*, 223-237.
- Hidayat, Muchtar (2011). Manajemen Aset (Privat dan Publik). Yogyakarta: LaksBang
- Jusup Al Haryono. (2011). Dasar-Dasar Akuntansi Jilid 1 (Edisi 7). STIE YKPN. Yogyakarta
- Keban, Yeremias T. (2008) Enam Dimensi Strategis Admisnitrasni Publik. Yogyakarta. Gava Media
- Koontsz, Harold&Cyril O'Donnel&Heinz Weihrich. (2007). Manajemen. Jakarta: Penerbit Erlangga
- Manullang (2008). Dasar- Dasar Manahemen. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press
- Matakena, P. J., Kusworo, & Madjid, U. (2021). Analisis Pengelolaan Barang Milik Daerah Pada Pemerintah Daerah Kabupaten Deiyai Provinsi Papua. *Visioner*, 271-286.
- Miles, M., & Huberman, A. (1984). Analisis Data Kualitatif. Terjemahan Oleh Tjepjep Rohendi Rohidi. 1992. Jakarta: Universitas Indonesia.
- Nabila, A. R. (2021). Analisis Manajemen Aset Pada Madrasah Ibtidaiyah Negeri (MIN) Kabupaten Langkat. *Literasi Jurnal Ekonomi dan Bisnis*, 36-49.
- Kaganova, O., &MC Kellar, J. (2006). *Managing Government Property Assets*. The Urban Institue: International Experience.
- Pasolong, H. (2007). *Teori Administrasi Publik*. Bandung: Alfabeta.
- Puspitoarum Monik Ajeng D.W. (2016). Analisis Pengelolaan Barang Milik Negara (BMN) Pada Badan Pusat Statistik. *Jurnal Administrative Reform*.
- Putri, F. S. (2020). Optimalisasi Pemanfaatan Sewa Barang Milik Negara Untuk Meningkatkan Penerimaan Negara Bukan Pajak. *Jurnal Ilmiu dan Riset Akuntansi*.
- Reeve, M. J., Carls, s. W., Duachac, J. E., Jonathan, E. D., & et all. (2010). *Pengantar Akuntansi Adopasi Indonesia (buku 2)* . Jakarta: Salemba Empat.
- Rosenbloom, D. H., & Deborah, G. D. (1989). *Publik Administration: Understanding Management, Politics, And Law In The Publik Sector*. NewYork: Random House.
- Ruliana, & Lubis, A. W. (2022). Analisis Pengelolaan Aset Tetap Pada Kantor Badan Kepegawaian Daerah Kota Medan. *EKOMA: Jurnal Ekonomi, Manajemen, Akuntansi*.
- Siagian, P. S. (2011). *Peranan Staff Dalam Manajemen*. Jakarta: Gunung Agung.
- Simbolon, Maringan Masry (2004) Dasar-Dasar Administrasi dan Manajemen. Jakarta: Ghalia Indonesia
- Sugiyono. (2019). *Metodelogi Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif dan R&D*. Bandung: ALFABETA.

- Sule Erni Trisnawati & Kurniawan Saefullah (2005). Pengantar Manajemen, Edisi Pertama: Cetaka Pertama Penerbit: Prenada Media Jakarta.
- Sumarno, R. M., & Rossieta, H. (2022). Optimalisasi Pengelolaan Aset Tetap Pada Pemerintah Provinsi Riau . *Journal Of Applied Business and Economic (JABE)*, 252-277.
- Supriyati. (2016). *Audit Laporan Keuangan Usaha Kecil dan Menengah Berbasis Akuntansi dan Perpajakan* . Yogyakarta: CV Andi Offset.
- Sutrisno, M. (2004). *An Investigation Of Participation Project Appraisal in Developing Countries Using Elements Of Value an Risk Management (Volume 1)*. Manchester: University Of Manchester Institute.
- Wijaya Kusuma Tarmizi, A. B., & E. S. (2022). Implementasi Kebijakan pengelolaan Barang Milik Negara Pada Politeknik Negeri Jember. *Asersi: Jurnal Akuntansi Terapan dan Bisnis*, 24-32.
- Yusuf, M. (2011). *8 Langkah Pengelolaan Aset Daerah Menuju Pengelolaan Keuangan daerah Terbaik, Cetakan kedua*. Jakarta: Salemba empat .

Peraturan Pemerintah

- Undang-Undang No. 23 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara. (Lembaran Negara RI Tahun 2003 No. 47, Tambahan Lembaran Negara RI No. 4286).
- Undang-Undang No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara RI No.5, Tambahan Lembaran Negara RI. No. 4355).
- Peraturan Pemerintah No. 28 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2020 No. 142, Tambahan Lembaran Negara RI No. 6523)
- Peraturan Menteri Keuangan Nomor 207/PMK.06/2021 Tahun 2021 tentang Pengawasan dan Pengendalian Barang Milik Negara (Berita Negara RI Tahun 2021 No.1471)
- Peraturan Menteri Keuangan Nomor 246/PMK.06/2014 Tahun 2014 tentang Tata Cara Pelaksanaan Penggunaan Barang Milik Negara (Berita Negara RI Tahun 2014 No.1977)
- Peraturan Menteri Keuangan Nomor 115/PMK.06/2020 tentang Pemanfaatan Barang Milik Negara (Berita Negara RI Tahun 2020 No.972)
- Peraturan Menteri Keuangan Nomor 111/PMK.06/2016 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Pemindahtanganan Barang Milik Negara (Berita Negara RI Tahun 2016 No. 1018)
- Peraturan Menteri Keuangan Nomor 181/PMK.06.2016 tentang Penatausahaan Barang Milik Negara (Berita Negara RI Tahun 2016 No.1817)
- Peraturan Menteri Keuangan Nomor 122 Tahun 2023 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang (Berita Negara RI 2023 N0. 926)
- Keputusan Menteri Keuangan Nomor 58/KMK.02/2022 tentang Penetapan Kementerian Negara/Lembaga yang diberikan Penghargaan atas Kinerja Anggaran Kementerian Negara/Lembaga Tahun Anggaran 2021.